BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

Laporan Keuangan
31 Desember 2021
Dan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UPT DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
Jalan Slamet Riyadi No. 53 Prembun – Kebumen Telp (0287) 6651144, 6651146
Email:rsudprembun@kebumenkab.go.id Kode Pos 54394

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
SERTA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	dr.H.Arif Komedi, M.Sc
Alamat Kantor	:	Jl. Slamet Riyadi No.53 Prembun, Kebumen
Alamat Domisili Sesuai KTP	:	Desa Kedungwaru Utara RT 001 RW 002, Prembun, Kebumen
Jabatan	:	Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen;
2. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kebumen tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kebumen, 8 Maret 2022
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun



dr.H.Arif Komedi, M.Sc
NIP.19680127 200212 1 002

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Realisasi Anggaran 1

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2

Neraca 3

Laporan Operasional 5

Laporan Arus Kas 6

Laporan Perubahan Ekuitas 8

Gambaran Umum 9

Kebijakan Akuntansi 11

Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 24

Penjelasan Neraca 29

Penjelasan Laporan Operasional 35

Lampiran

Persediaan

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dipindai dengan CamScanner

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00063/2.0282/AU.5/11/0182-2/1/III/2022

Kepada Yth.
Direktur dan Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun Kabupaten Kebumen
Jl. Slamet Riyadi No.53, Kecamatan Prembun
Kebumen

Laporan atas laporan keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen terlampir, yang terdiri dari laporan perubahan saldo anggaran lebih dan neraca tanggal 31 Desember 2021, serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melakukan audit atas laporan keuangan BLU/D berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Dipindai dengan CamScanner

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kantor Akuntan Publik
Darsono & Budi Cahyo Santoso



Budi Cahyo Santoso, SE, CA, CPA
NIAP : AP.0182
KEP-053/KM.17/1999

8 Maret 2022



Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN KEUANGAN

Dipindai dengan CamScanner

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lain-lain PAD yang Sah					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3	29.000.000.000	74.674.544.527	257%	29.763.471.674
Pendapatan Hasil Kerjasama	4	-	154.173.465	0%	28.155.210
Pendapatan Dari APBD	5	-	21.170.551.142	0%	25.003.945.146
Pendapatan Hibah	6	-	-	0%	-
Pendapatan Usaha Lainnya	7	-	454.885.911	0%	562.224.028
JUMLAH PENDAPATAN		**29.000.000.000**	**96.454.155.045**	**333%**	**55.357.796.058**
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	8	166.086.000	148.825.000	90%	7.311.892.900
Belanja Barang dan Jasa	8	53.900.924.000	50.536.080.692	94%	24.508.806.953
Belanja Lain-lain	8	-	-	0%	-
JUMLAH BELANJA OPERASI		54.067.010.000	50.684.905.692	92%	31.820.699.853
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	8	-	-	0%	-
Belanja Peralatan dan Mesin	8	12.328.905.000	11.072.507.093	90%	13.471.817.527
Belanja Gedung dan Bangunan	8	-	-	0%	1.840.644.000
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8	-	-	0%	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	8	10.000.000	4.740.000	47%	5.724.000
JUMLAH BELANJA MODAL		**12.338.905.000**	**11.077.247.093**	**90%**	**15.318.185.527**
JUMLAH BELANJA		**66.405.915.000**	**61.762.152.785**	**93%**	**47.138.885.380**
SURPLUS /(DEFISIT)		**(37.405.915.000)**	**34.692.002.260**	**-93%**	**8.218.910.678**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SILPA	9	14.181.489.000	14.181.489.009		-
Penerimaan Kembali Piutang	9	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**14.181.489.000**	**14.181.489.009**		**-**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9				
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	9	-	-	-	-
		-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**-**	**-**	**-**	**-**
PEMBIAYAAN NETO		**14.181.489.000**	**14.181.489.009**		**-**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**(23.224.426.000)**	**48.873.491.269**		**8.218.910.678**

Kebumen, 8 Maret 2022
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RSUD PREMBUN
UPT DINAS KES

dr. H. Arif Komedi, M.Sc
NIP. 19680127 200212 1 002

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	14.196.140.252	5.962.578.331
Penggunaan SAL	14.181.489.009	-
Subtotal	14.651.243	5.962.578.331
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	48.873.491.269	8.218.910.678
Subtotal	48.888.142.512	14.181.489.009
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Lain-Lain	(14.651.243)	14.651.243
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**48.873.491.269**	**14.196.140.252**

Kebumen, 8 Maret 2022
Direktur

dr. H. Arif Komedi, M.Sc
NIP. 19680127 200212 1 002

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
N E R A C A
31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	10	48.873.491.269	14.196.140.252
Piutang Pendapatan	11	18.642.529.510	5.027.997.424
Penyisihan Piutang		(1.707.135.227)	(69.157.442)
Piutang - Bersih		16.935.394.283	4.958.839.982
Belanja dibayar dimuka	12	-	9.444.444
Persediaan	13	4.492.911.875	3.846.819.267
JUMLAH ASET LANCAR		**70.301.797.427**	**23.011.243.945**
ASET TETAP			
Harga Perolehan:			
Tanah	14	3.449.458.000	3.449.458.000
Peralatan dan Mesin	14	102.195.843.170	91.175.035.631
Gedung dan Bangunan	14	110.754.118.757	108.815.677.757
Aset Tetap Lainnya	14	11.744.000	7.004.000
Jumlah Harga Perolehan Aset Tetap		**216.411.163.927**	**203.447.175.388**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	14	(85.217.804.117)	(63.921.712.395)
JUMLAH ASET TETAP		**131.193.359.810**	**139.525.462.993**
ASET LAIN-LAIN			
Aset Tak Berwujud	15	23.100.000	26.400.000
Aset Lain-lain	15	-	-
JUMLAH ASET LAIN-LAIN		**23.100.000**	**26.400.000**
JUMLAH ASET		**201.518.257.237**	**162.563.106.938**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
N E R A C A
31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Pihak Ketiga	16	-	14.651.243
Utang Beban	17	18.893.931.703	5.450.689.729
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**18.893.931.703**	**5.465.340.972**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**-**	**-**
JUMLAH KEWAJIBAN		**18.893.931.703**	**5.465.340.972**
EKUITAS			
Ekuitas	18	157.097.765.966	62.452.536.213
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	18	18.983.533.189	(561.421.812)
Koreksi Akumulasi Penyusutan	18	(200.420.767)	(8.239.620.239)
Koreksi Ekuitas Lainnya	18	6.743.447.146	103.446.271.804
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	18	-	-
JUMLAH EKUITAS		**182.624.325.534**	**157.097.765.966**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**201.518.257.237**	**162.563.106.938**

Kebumen, 8 Maret 2022
Direktur

dr. H. Arif Komedi, M.Sc
NIP. 19680127 200212 1 002

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
PAD Lain-lain yang Sah			
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	19	87.447.102.134	27.359.214.819
Pendapatan Hasil Kerjasama	20	203.229.278	28.155.210
Pendapatan APBN/APBD	21	21.170.551.142	25.003.945.146
Pendapatan Hibah	22	-	252.744.000
Pendapatan Usaha Lainnya	23	454.885.911	564.261.028
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**109.275.768.465**	**53.208.320.203**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	24	182.565.000	7.348.097.900
Beban Barang dan Jasa	24	67.327.404.977	27.379.669.028
Beban Penyusutan dan Amortisasi	24	21.098.970.955	19.019.116.156
Beban Penyisihan Piutang	24	1.683.294.344	22.858.931
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**90.292.235.276**	**53.769.742.015**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**18.983.533.189**	**(561.421.812)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
(Kerugian) Penurunan Nilai Aset		-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya			
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		**18.983.533.189**	**(561.421.812)**
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL		**18.983.533.189**	**(561.421.812)**

Kebumen, 8 Maret 2022
Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN RSUD PREMBUN UPT DINAS KESEHATAN

dr. H. Arif Komedi, M.Sc
NIP 19680127 200212 1 002

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	74.674.544.527	29.763.471.674
Pendapatan Hasil Kerjasama	154.173.465	28.155.210
Pendapatan APBD/APBN	21.170.551.142	25.003.945.146
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lain	454.885.911	562.224.028
Jumlah Arus Masuk Kas	**96.454.155.045**	**55.357.796.058**
Arus Keluar		
Pembayaran Belanja Pegawai	148.825.000	7.311.892.900
Pembayaran Belanja Barang	19.041.443.864	10.249.558.167
Pembayaran Belanja Jasa	29.701.271.120	12.516.122.617
Pembayaran Belanja Pemeliharaan	1.696.123.059	1.482.061.993
Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	97.242.649	261.064.176
Jumlah Arus Keluar Kas	**50.684.905.692**	**31.820.699.853**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**45.769.249.353**	**23.537.096.205**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk		
Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar		
Perolehan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.072.507.093	13.471.817.527
Perolehan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.840.644.000
Perolehan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.740.000	5.724.000
Jumlah Arus Keluar Kas	11.077.247.093	15.318.185.527
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(11.077.247.093)**	**(15.318.185.527)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk		
Perolehan Pinjaman		
Jumlah Arus Masuk Kas	**-**	**-**
Arus Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman		
Jumlah Arus Keluar Kas	**-**	**-**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**-**	**-**

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	1.884.669.380
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	
Jumlah Arus Masuk Kas	-	1.884.669.380
Arus Keluar		
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	1.870.018.137
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	14.651.243	-
Jumlah Arus Keluar Kas	14.651.243	1.870.018.137
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**(14.651.243)**	**14.651.243**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**34.677.351.017**	**8.233.561.921**
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	**14.196.140.252**	**5.962.578.331**
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	**48.873.491.269**	**14.196.140.252**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**34.677.351.017**	**8.233.561.921**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	157.097.765.966	62.452.536.213
SURPLUS/ (DEFISIT)- LO	18.983.533.189	(561.421.812)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Piutang	-	-
Transaksi antar Entitas	-	-
Koreksi Aset tetap non revaluasi	-	-
Koreksi Persediaan	-	-
Koreksi Pendapatan	-	-
Koreksi Hutang	-	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(200.420.767)	(8.239.620.239)
Koreksi Ekuitas Lainnya	6.743.447.146	103.446.271.804
Kewajiban yang Dikonsolidasikan	-	-
EKUITAS AKHIR	**182.624.325.534**	**157.097.765.966**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Prembun Kabupaten Kebumen (selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit Daerah Prembun) beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 53, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 449/255 Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Sebagai Sub Organisasi Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Surat keputusan Bupati Kebumen tersebut berlaku mulai 1 Januari 2019.

BLUD Rumah Sakit Daerah Prembun Kabupaten Kebumen telah mendapat Izin Operasional dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Nomor: 503/01/KEP/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.

b. Landasan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Prembun diselenggarakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur keuangan negara, antara lain:

1). Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indosesia Tahun 1950 Nomor 42;

2). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

15). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

16). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Pertambahan Lembaran Daerah Nomor 170);

17). Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

18). Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

c. Visi dan Misi

Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Profesional, Terjangkau dan Ramah Lingkungan".

Misi:

1). Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien dan terjangkau serta ramah lingkungan;

2). Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit yang profesional.

Moto: "SEHATI (Sigap, Empati, Handal, Akuntabel, Transparan, Inovatif)"

d. Susunan Pengurus

	31 Desember 2021 dan 2020
Dewan Pengawas:	
Ketua	: ----
Anggota	: ----

Pejabat Pengelola:	31 Desember 2021
Direktur	: dr. H. Arif Komedi, M.Sc
Pejabat Pengelola Keuangan	: Heny Setyowati, S.E. Ak. M.Ak.
Pejabat Pengelola Teknis	: 1. Tri Tunggal Eko Sapto, S.KM., MPH
	2. drg.Sri Purwitasari
	3. Anas Fauzi, S.KM., MM.

	31 Desember 2020
Direktur	: dr. Iwan Danardono, Sp.Rad, M.M.R
Pejabat Pengelola Keuangan	: Suseno, SE
Pejabat Pengelola Teknis	: 1. Asep Hartoyo, SKM, M.Si
	2. dr. Arif Komedi,M.Sc.
	3. Anas Fauzi,S.KM., MM.

Pengangkatan dr. H. Arif Komedi, M.Sc menggantikan dr. Iwan Danardono, Sp.Rad, M.M.R sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2.1/ 02/ KEP/ 2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pengangkatan Heny Setyowati, S.E. Ak. M.Ak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Prembun dan Tri Tunggal Eko Sapto, S.KM., MPH, drg.Sri Purwitasari dan Anas Fauzi, S.KM., MM. sebagai Pejabat Pengelola Teknis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 440/ 371 Tahun 2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

Pengangkatan dr. Iwan Danardono, Sp.Rad, M.M.R sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2/01/KEP/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pengangkatan Suseno, SE sebagai Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Prembun dan Asep Hartoyo, SKM, M.Si, dr. Arif Komedi,M.Sc. dan Anas Fauzi,SKM.,MM. sebagai Pejabat Pengelola Teknis berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 440/2 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Tahun Anggaran 2020.

Jumlah karyawan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prembun tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 438 orang (tidak diaudit) dan 398 orang (tidak diaudit) yang terdiri dari:

	31 Desember 2021	**31 Desember 2020**
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	131 orang	112 orang
Pegawai BLUD	198 orang	197 orang
Dokter Mitra	3 orang	1 orang
Internship	17 orang	10 orang
Dokter Spesialis	1 orang	1 orang
THL	88 orang	77 orang
Jumlah	**438 orang**	**398 orang**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen mengacu kepada Peraturan Bupati Kebumen Nomor: 106 TAHUN 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan terdapat dalam Lampiran II tentang Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi BLUD serta mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

a. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Prembun adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (accrual basis)namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas.

Aset, kewajiban, ekuitas pada Neraca, pendapatan dan beban pada Laporan Operasional (LO) diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis Kas yaitu transaksi diakui pada saat kas diterima atau kas keluar dari bendahara.

Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap akun dalam laporan keuangan. Pengukuran akun-akun dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang Rupiah**.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Lingkup kas di BLUD meliputi:
1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Kas BLUD

Kas dan setara kas diakui dan dicatat pada saat diterima oleh bendahara penerimaan atas pendapatan yang diterima atau pada saat ditandatanganinya SP2BP oleh pejabat fungsi perbendaharaan atas pengeluaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran.

Pendapatan dari deposito berupa bunga deposito diakui pada saat diterima di rekening bank atau pada saat diperoleh bunga deposito. Setara Kas yang berupa investasi jangka pendek yang sangat likuid diakui pada saat disahkannya bukti penyimpanan atas investasi tersebut.

Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah, Apabila terdapat kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada Neraca.

d. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama tiga sampai dengan dua belas bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Karakteristik investasi jangka pendek sebagai berikut:
1). Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2). Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas;
3). Beresiko rendah.

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1). Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD;

2). Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran kas diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat ditandatanganinya sertifikat deposito atau dokumen lainnya yang dianggap sama.

Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominalnya dan dinyatakan dalam rupiah. Jika ada Investasi Jangka Pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan tanggal neraca. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai.

e. Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan BLUD adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Piutang pendapatan BLUD di bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah merupakan piutang yang timbul dari penyerahan jasa layanan kepada pasien umum, pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS), dan pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD.

Transaksi piutang BLUD memiliki karakteristik sebagai berikut:
1). Terdapat penyerahan barang, jasa, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2). Adanya persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; dan/atau;
3). Jangka waktu pelunasan/penyelesaian tertentu.

Pengakuan piutang pendapatan
1). Piutang atas jasa layanan kepada pasien umum diakui dan dicatat pada saat dibuat daftar rincian tagihan biaya perawatan dan/atau diberikannya persetujuan oleh pejabat yang ditunjuk atas biaya perawatan yang belum dibayar, yang dituangkan pada form Surat Pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga yang bertanggung jawab terhadap pasien dan pembayaran.
2). Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien penerima jaminan kesehatan (BPJS) diakui dan dicatat pada saat diterbitkan berita acara hasil verifikasi.
3). Piutang jasa layanan atas jasa layanan kepada pasien yang berasal dari perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan maupun RSUD diakui dan dicatat pada saat BLUD mengajukan daftar klaim kepada penyedia jasa jaminan kesehatan.
4). BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
5). Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran, penyesuaian atau dilakukan penghapusan.

6). Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7). Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka pelunasan tersebut dicatat sebagai pendapatan lain- lain tahun berjalan (Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah Lainnya).

8). Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan

1). Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan yang berlaku.

2). Terhadap setiap piutang yang ada harus diperhitungkan risiko tidak tertagihnya piutang sesuai dengan kemungkinan risiko yang dihadapi tergantung pada jangka waktu belum tertagihnya piutang dalam bentuk Penyisihan Kerugian Piutang.

3). Penyisihan kerugian piutang tak tertagih atas piutang pendapatan BLUD dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan cluster atau kelompok dan umur piutang.

4). Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

No.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TAK TERTAGIH
1.	0 s/d 1 bulan	5 per mil
2.	> 1 bulan s/d 1	10%
3.	> 1 s/d 3 tahun	50%
4.	> 3 tahun	100%

5). Dapat dihapusbukukan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. Atas piutang yang telah dihapusbukukan masih dicatat secara extra *comptable* dan tetap diusahakan penagihannya. Piutang yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah)/Lembaga Penjamin yang masih eksis lembaganya, tidak dilakukan penyisihan piutang.

6). Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7). Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas.

8). Dalam hal kejadian khusus, misalnya kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tagihan-tagihan tersebut dapat langsung diusulkan penghapusannya walaupun belum memenuhi ketentuan di atas.

9). Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan, pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.

Sistem dan prosedur penghapusan piutang BLUD di lingkungan dinas/badan Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

f. Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain adalah piutang yang timbul bukan berasal dari aktivitas utama (kegiatan operasional) yang jangka waktu pelunasannya kurang dari satu tahun. Piutang Lain-lain di Aset lancar dapat berasal dari bagian lancar Piutang Jangka Panjang. Piutang Lain-lain pada bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah berupa:

1). Piutang pegawai;
2). Piutang sewa;
3). Piutang kerjasama prasional; dan
4). Piutang lain-lain.

Pengakuan Piutang Lain-lain

1). Piutang pegawai diakui pada saat diterbitkan surat perjanjian/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada pegawai.
2). Piutang sewa, piutang kerjasama operasional dan piutang lainnya diakui pada saat timbulnya hak tagih kepada pihak ketiga.
3). Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran.
4). Piutang Lain-lain yang merupakan Bagian Lancar dari Piutang Jangka Panjang di Aset Lancar diakui dan dibentuk tiap periode penyusunan Laporan Keuangan dengan cara melakukan pemindahan rekening/ reklasifikasi rekening dari piutang jangka panjang ke Piutang lain-lain di Aset Lancar.
5). Atas piutang lain-lain tidak dibentuk penyisihan kerugian piutang tak tertagih karena terbentuknya piutang didasarkan pada perjanjian yang penjaminannya sudah pasti.

Piutang Lain-lain diukur sebesar jumlah yang akan dibayarkan atau sebesar hak tagih yang timbul.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa pelayanan yang habis dipakai atau untuk dijual dalam satu periode akuntansi.

Persediaan BLUD meliputi:
1). Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD;
2). Barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD Pengakuan.

Persediaan BLUD diakui pada saat:
1). Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2). Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan di Kartu Persediaan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau *expired* tidak dapat dimanfaatkan tidak dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pencatatan persediaan di luar Laporan Neraca (Ekstrakomptabel) didasarkan pada dokumen dalam bentuk Laporan yang menyatakan bahwa kondisi persediaan tersebut sudah tidak dapat dipergunakan untuk bahan operasional pelaksanaan kegiatan BLUD.

Pengukuran persediaan:

Persediaan dicatat sebesar nilai barang yang belum terpakai atau terjual.

Persediaan dinilai berdasarkan:

1). Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian atau nilai realisasi bersih (harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual), mana yang lebih rendah.
2). Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Persediaan diakui dan dicatat pada saat pembelian sebesar nilai perolehannya. Nilai perolehan adalah seluruh

biaya pembelian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai persediaan tersebut diterima.

Persediaan yang belum digunakan/belum terpakai/belum terjual pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) dan harga pembelian terakhir. Sisa persediaan tersebut dicatat dalam neraca dan mengoreksi/mengurangi nilai beban barang dan jasa. Pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dijurnal balik (*reversing entry*) menjadi beban.

Persediaan yang telah kadaluarsa dan atau tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan dicatat sebagai aset lainnya dan akan ditindaklanjuti dengan penghapusan atau pemusnahan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Persediaan yang belum digunakan/belum terpakai/belum terjual pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) dan harga pembelian terakhir.

h. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka suatu biaya yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD yang jangka waktunya melebihi atau melewati tahun berjalan.

Beban dibayar di muka diakui pada saat:
1). pembayaran;
2). jasa diterima;
3). jasa diterima atau berlalunya waktu.

Beban dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/ dipertanggungjawabkan.

i. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Aset tetap meliputi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1). Tanah:
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.

2). Peralatan dan Mesin:
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dai 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3). Gedung dan Bangunan:
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap pakai.

4). Jalan, Irigasi dan Jaringan:
Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh BLUD dan dalam kondisi siap pakai.

5). Aset Tetap Lainnya.
Aset Tetap mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6). Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum dimanfaatkan.

Pengakuan Aset Tetap

1). Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

2). Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

3). Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   a). Berwujud;
   b). Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c). Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d). Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   e). Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
   f). Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ ongkos untuk dipeliahara;
   g). Barang dapat digunakan secara mandiri;
   h). Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

4). Batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Santuan / Unit (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	300.000
3	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4	Jalan	-
5	Jembatan	-
6	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman	-
7	Sungai	-
8	Instalasi dan Jaringan	-
9	Buku	-
10	Barang Bercorak Kesenian/	-

5). Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja operasional;

6). Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran Aset Tetap

1). Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2). biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

3). Biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
   a) Honorarium terkait Pengadaan Barang dan Jasa;
   b) Belanja dokumen/administrasi tender;
   c) Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;

d) Belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan / menggunakan jasa konsultan)

e) Belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap
f) Biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.

4). Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

5). Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

6). Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

7). Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.

8). Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.

9). Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai Pendapatan-LO.

10). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Rumusan perhitungan penyusutan adalah :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Periode penyusutan dilakukan per bulan.

j. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset BLUD yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
Aset Lainnya terdiri dari :
1). Taguhan Penjualan Angsuran.
2). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.
3). Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1). Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2). Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan barang BLUD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
3). Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan barang BLUD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
4). Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
5). Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
6). Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

Pengakuan kemitraan dengan pihak ketiga

1). Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah.
2). Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
3). Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
4). Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
5). Bangun Guna Serah (*Build, Operate, Transfer–BOT*) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
6). Bangun Serah Guna (*Build, Transfer Operate,–BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

Pengukuran kemitraan dengan pihak ketiga

1). Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2). Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
3). Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
4). Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

k. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Aset Tak Berwujud:

1). *Goodwill*
Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2). Hak Paten atau Hak Cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3). Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4). *Software*
Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer

5). Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6). Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas BLUD untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat aset tak berwujud disesuaikan dengan jangka waktu kontrak atau ijin yang disetujui.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aktiva Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tak Berwujud

Pengeluaran setelah perolehan dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud apabila pengeluaran tersebut dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria meningkatkan fungsi atau meningkatkan efisiensi Aset Tak Berwujud dimaksud. Apabila pengeluaran tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

Batasan minimal kapitalisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

l. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

m. Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lainnya di luar kas, pemberian jasa atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaian yaitu kewajiban jangka pendek dan keawajiban jangka panjang.

1). Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang meliputi: utang usaha, Utang Pajak, Pendapatan diterima dimuka, biaya yang masih harus dibayarkan, bagian lancar utang jangka panjang, titipan pihak ketiga, kewajiban jangka pendek lainnya.

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal dan berkurang pada saat pembayaran/penyelesaian oleh BLUD. Kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs dicatat sebagai keuntungan selisih nilai tukar atau kerugian penurunan nilai.

2). Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis kewajiban jangka panjang antara lain Utang/pinjaman jangka panjang.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekeonomi di masa depan timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

n. Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri dari Ekuitas dan Ekuitas SAL.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA terikat Permanen.

Jenis Ekuitas:

1). Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas tidak terikat diakui pada saat:
a) Ekuitas Awal
b) Surplus dan Defisit Tahun Lalu
c) Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
d) Ekuitas Donasi

2). Ekuitas Terikat Temporer
Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh BLUD.

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar:
a) Nominal hibah yang bersifat mengikat temporer baik berupa kas maupun barang (non kas).
b) Nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang andal.

Ekuitas disajikan di Neraca dan di jelaskan rinciannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL (LO)

o. Pendapatan pada Laporan Operasional (LO)

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang terdiri dari:
1). Pendapatan dari alokasi APBD.
2). Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat.
3). Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas pelaporan.
4). Pendapatan hasil kerjasama.
5). Pendapatan yang bersal dari hibah dalam bentuk kas / barang / jasa.

Pendapatan usaha dari Jasa Layanan dan Lain-lain pendapatan yang sah diakui pada saat timbulnya hak atas jasa layanan atau diterimanya pendapatan oleh Bendahara Penerima atau Kasir.

Pendapatan dari APBD dan APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

Pendapatan Hibah diakui pada saat ditandatangani Berita Acara Serah Terima Barang atau Jasa.

Pendapatan Laporan Operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan Laporan Operasional bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

p. Beban Pada Laporan Operasional (LO)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban BLUD diakui pada saat:
1). Timbulnya kewajiban
2). Terjadinya konsumsi aset
3). Terjadi penurunan manfaat ekonomi potensi jasa.

Beban diukur berdasarkan asas bruto sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta resiko tidak tertagihnya piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur mengenai Penyusutan/Amortisasi dan Perhitungan Risiko Tidak tertagihnya Piutang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

q. Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak unit kerja dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan pada Laporan Realisasi Angaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan diakui pada saat:

1). Diterima di oleh bendahara penerimaan atau diterima oleh kasir;
2). diterima secara non tunai/transfer di rekening Kas BLUD.

Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulumengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

r. Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari Rekening BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode satu tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Belanja diakui pada saat pengeluaran disahkan oleh pejabat yang diserahi fungsi perbendaharaan.

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

s. Pembiayaan Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1). Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
2). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas BLUD yang meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas BLUD dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD.

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran dalam mata uang rupiah, pembiayaan yang menggunakan mata uang asing diukur dan dikonvesikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

PENJELASAN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3. PENDAPATAN JASA LAYANAN DARI MASYARAKAT

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Layanan Pasien Umum/ Retribusi Daerah		
a. Pendapatan IGD	654.114.111	931.606.263
b. Pendapatan Rawat Jalan	2.665.347.723	1.796.735.889
c. Pendapatan Rawat Inap	3.921.016.606	5.651.247.325
d. Pendapatan Covid	45.631.752.000	-
e. MCU Haji	-	108.098.400
f. Radiologi	-	31.276.500
g. Laborat	-	19.600.000
h. Pendapatan Layanan Pasien Umum lainnya	1.998.000	934.000
Sub Jumlah	52.874.228.440	8.539.498.377
Kapitasi	-	-
Non Kapitasi		
a. Pendapatan Rawat Jalan	7.400.594.680	6.434.696.700
b. Pendapatan Rawat Inap	13.221.482.200	13.766.001.000
c. Ambulance	43.916.600	-
d. Farmasi	1.134.322.607	-
e. Ganti Rugi BPJS	-	125.277.456
f. Obat BPJS	-	897.998.141
Sub Jumlah	21.800.316.087	21.223.973.297
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	**74.674.544.527**	**29.763.471.674**

4. PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Sewa	39.329.750	15.522.750
Pendapatan Jasa dan Lainnya	114.843.715	12.632.460
Jumlah	**154.173.465**	**28.155.210**

Catatan sehubungan pos ini:

Pendapatan sewa merupakan pendapatan yang berasal dari sewa ATM Bank Jateng dan pendapatan jasa dan lainnya merupakan pendapatan dari hasil rapid test siswa praktek dan sewa manekin.

5. PENDAPATAN APBD

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan APBD	21.170.551.142	25.003.945.146
Jumlah	**21.170.551.142**	**25.003.945.146**

Catatan sehubungan pos ini:
Pendapatan dari dana APBD terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Operasi, dan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

6. PENDAPATAN HIBAH

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Hibah dari Masyarakat	-	-
Jumlah	**-**	**-**

7. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Bunga Deposito	255.862.998	435.534.230
Pendapatan Parkir	22.647.300	37.745.000
Pendapatan Jasa Giro	176.375.613	88.944.798
Jumlah	**454.885.911**	**562.224.028**

8. BELANJA

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
A. Belanja Operasi		
1). Belanja Pegawai:		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	3.600.000
Belanja Tunjangan Tertentu	-	29.864.400
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.620.000	217.475.000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	5.155.000	4.400.000
Honorarium Penerima Panitia Hasil Pekerjaan	-	1.650.000
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	-	-
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	6.946.320.000
Belanja Pegawai BLUD	-	-
Honorarium PNS Lainnya	6.050.000	-
Uang Lembur PNS	-	84.797.600
Uang Lembur Non PNS	-	23.785.900
Jumlah Belanja Pegawai	**148.825.000**	**7.311.892.900**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
2). Belanja Barang dan Jasa		
a). Belanja Barang		
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	60.944.720	203.084.030
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	196.648.600	72.277.600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	94.241.110	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	524.946.559	279.852.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegia	279.162.100	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	523.793.600	395.153.290
Belanja Obat-Obatan-Obat	7.384.197.508	3.787.200.182
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	230.057.930	169.942.520
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	995.431.920	451.246.620
Belanja Bahan-Bahan Kimia	17.240.000	32.047.800
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	187.486.485	199.436.616
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.776.350	12.815.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.585.790.534	381.361.391
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.839.000	6.924.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	180.818.000	1.922.881.602
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.000.000	47.643.500
Belanja Pemakaian Barang laboratorium	1.463.599.853	990.479.538
Belanja Natura dan Pakan - Natura	1.367.418.195	916.163.708
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.151.000	197.188.970
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.309.900	108.356.600
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.296.400	6.002.700
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.215.200	-
Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000	-
Belanja Pakaian Penyelamatan	404.576.000	-
Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	69.500.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	128.997.000	-
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	39.044.500	-
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	151.181.400	-
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.780.000	-
Sub Jumlah	19.041.443.864	10.249.558.167
c). Belanja Jasa:		
Belanja Tagihan Telepon	10.722.877	13.498.600
Belanja Tagihan Air	112.555.450	100.852.450
Belanja Tagihan Listrik	835.356.160	802.948.080
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	962.400	65.700
Belanja Jasa Uji Laboraturium	16.967.000	830.068.884
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000	-
Belanja Jasa Kalibrasi	199.426.700	-
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Piak Ketiga/Pihak Lain	417.578.350	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	109.216.500	-
Belanja Jasa Khusus Konsultasi dan Sertifikasi	211.143.000	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	-	119.390.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	179.630.800

Jumlah Dipindahkan	1.915.928.437	2.046.454.514

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Jumlah Pindahan	1.915.928.437	2.046.454.514
Belanja Jasa Pelayanan Medis (non Kapitasi)	-	9.889.256.414
Belanja Pemberian Jasa Tenaga Ahli	-	92.500.000
Belanja Pemberian Jasa Kontribusi Asosiasi	793.881.700	279.895.000
Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	3.000.000	18.888.889
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	450.000	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.150.000	-
Belanja Sewa Hotel	450.000	-
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.173.500	9.423.500
Belanja Paket/Pengiriman	1.381.340	959.700
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.680.000	4.968.000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	46.466.801	47.187.300
Belanja Medical Check Up	49.325.900	-
Belanja Registrasi/Keanggotaan	-	16.900.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.050.000	7.700.000
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.586.251.541	-
Belanja Lembur	84.229.200	-
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	187.041.541	101.989.300
Belanja Barang Dan Jasa BLUD	811.160	-
Sub Jumlah	29.701.271.120	12.516.122.617
d). Belanja Pemeliharaan:		
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	66.910.475	18.423.000
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	655.916.199	789.106.448
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	973.296.385	674.532.545
Sub Jumlah	1.696.123.059	1.482.061.993
e). Belanja Perjalanan Dinas		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	77.359.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.242.649	183.705.176
Sub Jumlah	97.242.649	261.064.176
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	**50.536.080.692**	**24.508.806.953**
B) Belanja Modal		
1). Belanja Tanah	-	-
2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
Belanja Modal AC Central	-	196.240.000
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	136.722.072	661.987.300
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.698.457.901	114.873.800
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.451.671.765	3.239.052.379
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	130.000.000	-
Jumlah Dipindahkan	6.416.851.738	4.212.153.479

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2021, Serta Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2020
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	**2020**
Jumlah Pindahan	6.416.851.738	4.212.153.479
Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	450.000.000	619.774.000
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiologi	1.510.173.000	6.446.775.134
Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	141.103.893
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	98.945.300	-
BLUD	-	112.808.000
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	574.803.000
Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	116.356.900	159.604.600
Belanja Modal Meubelair	46.259.312	241.698.020
Belanja Modal Alat Pembersih	3.250.000	22.235.001
Belanaj Modal Alat Pendingin	245.347.500	701.495.000
Belanja Modal Alat Dapur	2.200.000	50.609.400
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.910.000	30.250.000
Belanja Modal Personal	-	90.918.000
Belanja Modal Personal Komputer	321.160.000	8.900.000
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	12.098.600	4.200.000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.609.000	54.490.000
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	184.141.825	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Tak Bermotor	7.975.000	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Universal	775.368	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Biasa	1.980.000	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan	28.257.000	-
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	29.940.000	-
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.495.000	-
Belanja Modal Handphone	14.720.000	-
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya (Laptop)	188.887.000	-
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.097.753.500	-
Belanja Modal Peralatan Jaringan	119.900.000	-
Belanja Modal Pompa	45.000.000	-
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	9.790.000	-
Belanja Modal Perkakas Standard	6.117.771	-
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.623.279	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Lab. Farmasi	48.000.000	-
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	14.990.000	-
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.072.507.093	13.471.817.527
3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
Pembangunan Gedung Kantor	-	1.840.644.000
Pembuatan Taman		
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.840.644.000
4). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Buku Perpustakaan	4.740.000	5.724.000
Jumlah Belanja Aset tetap Lainnya	4.740.000	5.724.000
Jumlah Belanja Modal	**11.077.247.093**	**15.318.185.527**

9. PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Penerimaan Pembiayaan		
Penggunaan SILPA	14.181.489.009	-
Penerimaan Kembali Piutang	-	-
Jumlah	**14.181.489.009**	**-**

PENJELASAN AKUN NERACA DAN LAPORAN OPERASIONAL

10. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri atas:	31 Desember 2021	31 Desember 2020
a. Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	11.541.311	23.038.417
Sub jumlah	11.541.311	23.038.417
b. Setara Kas		
Giro Bank Jateng Cab. Kebumen	48.861.949.958	14.173.101.835
Sub jumlah	48.861.949.958	14.173.101.835
c. Deposito		
Deposito Bank Jateng Cab. Kebumen	-	-
Sub jumlah	-	-
Jumlah kas dan setara kas	**48.873.491.269**	**14.196.140.252**

11. PIUTANG USAHA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akun ini terdiri atas:		
Piutang Pendapatan Covid	16.262.701.800	-
Piutang Pendapatan BPJS	2.114.672.163	4.928.606.686
Piutang Pendapatan Pasien Umum	142.694.581	97.353.738
Piutang Pendapatan Parkir	-	2.037.000
Piutang Pendapatan TCM	12.075.000	-
Piutang Pendapatan Jasa Raharja	29.447.269	-
Piutang Pendapatan Taspen	8.025.544	-
Piutang Pendapatan Sewa Gedung	1.545.000	-
Piutang Pendapatan CT Scan	71.368.153	-
Jumlah Piutang Usaha	**18.642.529.510**	**5.027.997.424**
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.707.135.227)	(69.157.442)
Jumlah Piutang Bersih	**16.935.394.283**	**4.958.839.982**

(Rincian lebih lanjut lihat Lampiran I)

12. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2021	33 Desember 2020
Akun ini terdiri atas:		
Beban sewa dibayar dimuka	-	9.444.444
	-	**9.444.444**

13. PERSEDIAAN BLU

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akun ini terdiri atas:		
Persediaan Obat dan Farmasi :		
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan	1.496.824.743	1.354.322.626
b. Persediaan Bahan obat-obatan	2.368.056.824	2.191.464.261
c. Persediaan Bahan kimia	354.438.583	168.929.477
d. Persediaan Bahan Makanan Pokok	33.155.250	46.938.835
Sub Jumlah	4.252.475.400	3.761.655.199
Persediaan Gudang :		
a. Persediaan Alat Tulis Kantor	65.777.300	17.800.843
b. Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	-	17.413.900
c. Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	136.379.175	14.658.025
d. Persediaan Isi tabung gas	38.280.000	35.291.300
Sub Jumlah	240.436.475	85.164.068
Jumlah Persediaan	**4.492.911.875**	**3.846.819.267**

(Rincian Persediaan Obat dan BHP Farmasi dapat dilihat pada Lampiran II)

14. ASET TETAP

31 Desember 2021

Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	3.449.458.000			3.449.458.000
Gedung dan Bangunan	108.815.677.757	1.938.441.000	-	110.754.118.757
Peralatan dan Mesin	91.175.035.631	11.072.507.093	51.699.554	102.195.843.170
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	7.004.000	4.740.000	-	11.744.000
Jumlah	203.447.175.388	13.015.688.093	51.699.554	216.411.163.927
Akumulasi Penyusutan				
Gedung dan Bangunan	10.582.160.823	2.415.503.129		12.997.663.952
Peralatan dan Mesin	53.339.551.572	18.880.588.593		72.220.140.165
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-			-
Aset tetap lainnya	-			-
Jumlah	63.921.712.395	21.296.091.722	-	85.217.804.117
Nilai Buku	**139.525.462.993**			**131.193.359.810**

Catatan sehubungan akun ini:

Pada Tahun 2021 terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp13.015.688.093,00 merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari dana BLUD, dana APBD dan mutasi dari DPURR Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.072.507.093,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.740.000,00 merupakan penambahan dari belanja modal.

b. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.938.441.000,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/ 12944 tanggal 31 Desember 2021 oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pada tahun 2021, terdapat pengurangan aset tetap sebesar Rp51.699.554,00 yang terdiri dari:

a. Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp50.815.572,00 merupakan koreksi atas aset yang tidak tergolong belanja modal (BM).

b. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp883.982,00 yang berasal dari reklas aset ekstrakompatable (kapitasi dibawah Rp 300.000,00).

Terdapat penyesuaian saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berbeda dengan daftar aset tetap dan telah dikoreksi pada ekuitas sebesar Rp200.420.753,00 merupakan akumulasi penyusutan tahun berjalan sebesar Rp130.715.300,00 dan jurnal penyesuaian koreksi akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp69.705.467,00

Terdapat penyesuaian saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berbeda dengan daftar aset tetap dan telah dikoreksi pada ekuitas sebesar Rp14,00.

31 Desember 2020

Harga Perolehan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	3.412.610.000	36.848.000		3.449.458.000
Gedung dan Bangunan	2.310.113.000	106.505.564.757		108.815.677.757
Peralatan dan Mesin	77.674.318.104	13.501.817.527	1.100.000	91.175.035.631
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	1.280.000	5.724.000	-	7.004.000
Jumlah	83.398.321.104	120.049.954.284	1.100.000	203.447.175.388
Akumulasi Penyusutan				
Gedung dan Bangunan	46.202.260	10.535.958.563		10.582.160.823
Peralatan dan Mesin	36.550.129.240	16.789.422.332	-	53.339.551.572
Jalan, Irigasi dan Jaringan				-
Aset tetap lainnya	-			-
Jumlah	36.596.331.500	27.325.380.895	-	63.921.712.395
Nilai Buku	**46.801.989.604**			**139.525.462.993**

Catatan sehubungan akun ini:

Penambahan aset tetap sebesar Rp120.049.954.284,00 merupakan penambahan aset tetap yang berasal dari dana BLUD sebesar Rp 630.862.200,00, dana APBD sebesar Rp 14.687.323.327,00, dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sebesar RP36.848.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebesar Rp 104.481.285.757,00, reklas sebesar Rp183.635.000,00 dan hibah sebesar Rp 30.000.000,00. Dalam aset tetap juga terdapat pengurangan Rp 1.100.000,00 akibat dari reklas aset ekstrakompatable (kapitasi dibawah Rp 300.000,00). Adapun rinciannya sebagai berikut:

a). Penambahan Tanah sebesar Rp 36.848.000,00,00 merupakan penambahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atas Tanah Eks Puskesmas Prembun berdasarkan Berita Acara Serah terima Nomor:028/8135/BA/2020 Tanggal 23 November 2020.

b). Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp13.501.817.527,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal dana APBD Rp 12.846.679.327,00, Belanja Modal dana BLUD sebesar Rp 625.138.200,00 dan Hibah dari Bank Jateng Cabang Kebumen sebesar Rp 30.000.000,00.

c). Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp106.505.564.757,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal APBD Rp 1.840.644.000,00, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen atas bangunan gedung tahun 2014-2016 Rp 104.481.285.757,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 028/952/BA-STA/VI/2020 Tanggal 22 Juni 2020 dan reklas aset bangunan rumah sakit dan rumah dinas yang sudah selesai pembangunannya dan dicatat ke aset tetap sebesar Rp183.635.000,00.

d). Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.724.000,00 merupakan penambahan dari Belanja Modal BLUD berupa Buku Umum.

Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.100.000,00 yang berasal dari reklas aset ekstrakompatable (kapitasi dibawah Rp 300.000,00).

Terdapat penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan yang berbeda dengan daftar aset tetap dan telah dikoreksi pada ekuitas lainnya sebesar Rp8.359.498.861,00.

Terdapat penyesuaian saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang berbeda dengan daftar aset tetap dan telah dikoreksi pada ekuitas lainnya sebesar Rp49.934.122,00.

15. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akun ini terdiri atas:		
Buku Umum	-	-
Aset Lainnya BLUD	-	-
Aset tidak berwujud	33.000.000	33.000.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.900.000)	(6.600.000)
Aset lain-lain (rusak)	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain (rusak)	-	-
Jumlah	**23.100.000**	**26.400.000**

16. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akun ini terdiri atas:		
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	14.651.243
Jumlah	**-**	**14.651.243**

17. UTANG BEBAN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Akun ini terdiri atas:		
Utang Barang dan Jasa		
Utang Jasa Pelayanan Medis	18.668.120.156	3.902.530.108
Sub Jumlah	18.668.120.156	3.902.530.108
Utang Jasa Uji Laboratorium		
Utang PMI	60.635.000	36.160.000
Utang Laboratorium CITO Yogyakarta	8.720.000	3.870.000
Utang RSUD dr. Soedirman Kebumen	8.861.720	6.608.000
Utang RS PKU Gombong	-	-
Sub Jumlah	78.216.720	46.638.000
Utang Barang dan Jasa BLUD		
Utang Tagihan Air	11.859.000	8.170.000
Utang Tagihan Internet	3.984.500	-
Utang Tagihan Listrik	79.181.320	-
Utang Tagihan Telepon	764.507	-
Sub Jumlah	95.789.327	8.170.000
Jumlah Dipindahkan	18.842.126.203	3.957.338.108

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Pindahan	18.842.126.203	3.957.338.108
Utang Honorarium Pegawai Honorer/Tdk Tetap		
Utang Gaji Pegawai Kontrak dan THL Kekurangan Bln Desember 2021	31.240.000	36.205.000
Sub Jumlah	31.240.000	36.205.000
Utang Pemberian Jasa Tenaga Ahli		
Gaji dr. Ester	-	1.875.000
Gaji dr. Raditya	-	625.000
Gaji Dokter Pengganti Spesialis Anastesi Kekurangan Bulan Desember 2021	2.500.000	-
Sub Jumlah	2.500.000	2.500.000
Utang Barang dan Jasa BLUD Belanja Obat		
PT Kimia Farma	9.487.500	-
PT Anugrah Pharminda Lestari	-	127.794.626
PT Combi Putra Mandiri	-	18.565.801
PT Merapi Utama Pharma	-	155.344.383
PT Dosni Roha	-	7.108.200
PT Anugrah Argon Medica	-	115.384.811
PT Daya Muda Agung	-	7.218.750
PT Distriversa Buanamas	-	21.271.140
PT Parit Padang Global	-	99.996.609
PT Sapta Sari Tama	-	57.267.342
PT Kimia Farma T&D	-	102.494.266
PT Tiara Kencana	-	18.221.940
PT Enseval Putera Megatrading	-	55.599.501
PT Antar Mitra Sembada	-	32.765.134
PT Bina San Prima	-	64.165.332
PT Indofarma Global Medika	-	21.194.247
PT Marga Nusantara Jaya	-	15.080.472
PT Millenium Pharmacon International	-	7.392.000
PT Tri Sapta Jaya	-	14.993.946
PT Kebayoran Pharma	-	12.808.125
Sub Jumlah	9.487.500	954.666.625
Utang Barang dan Jasa BLUD Belanja Bahan Kimia/Laborat		
PT Anugrah Argon Medica	-	5.525.000
PT Marco Inti Guna	-	5.940.000
PT Merapi Kedaton Agung	-	56.450.000
Sub Jumlah	-	67.915.000
Utang Barang dan Jasa BLUD Belanja Alkes BMHP		
PT. Berjaya Mata	8.578.000	-
PT Anugrah Pharminda Lestari	-	22.762.033
PT Merapi Utama Pharma	-	29.357.500
PT Anugrah Argon Medica	-	6.794.199
PT Parit Padang Global	-	44.472.892
PT Kimia Farma T&D	-	17.560.620
PT Enseval Putera Megatrading	-	25.903.200
Jumlah Dipindahkan	18.885.353.703	5.018.624.733

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah Pindahan	18.885.353.703	5.018.624.733
PT Inti sumber Hasil Sempurna	-	51.432.330
PT Megah Medika Pharma	-	29.202.800
UD Karya Agung Mandiri	-	7.362.500
PT Anugrah Tunas Medika	-	3.000.000
PT Glomed Adinata Prima	-	3.324.000
PT Inderval Jaya Utama	-	32.450.000
PT Rajawali Nusindo	-	17.413.206
PT Daun Pandan Medika	-	69.492.836
PT Kalimas Inti Niaga	-	5.950.000
PT Teluk Pursel Sejahtera	-	8.850.000
PT Duta Lestari Sentratama	-	5.700.000
PT Daya Prima Kartikamulti Sarana	-	4.000.000
Sub Jumlah	8.578.000	385.028.116

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Utang Barang dan Jasa BLUD Belanja Gas Medis		
PT Samator Gas Industri	-	47.036.880
Sub Jumlah	-	47.036.880
Jumlah Utang Beban	**18.893.931.703**	**5.450.689.729**

18. EKUITAS

Akun ini terdiri atas:	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	157.097.765.966	62.452.536.213
Surplus/Defisit-LO	18.983.533.189	(561.421.812)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Utang		
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(200.420.767)	(8.239.620.239)
Koreksi Ekuitas Lainnya	6.743.447.146	103.446.271.804
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-
Jumlah	**182.624.325.534**	**157.097.765.966**

Catatan sehubungan akun ini:

Terdapat Dampak Komulatif Perubahan - Kebijakan Kesalahan Mendasar sebesar Rp6.543.026.379,00 yang berasal dari Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp6.743.447.146,00 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp200.420.767,00) yang merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2021.

Koreksi Akumulasi Penyusutan (Rp200.420.767,00) merupakan koreksi akumulasi penyusutan yang terdiri dari:

a. Akumulasi Penyusutan	(130.715.300)
b. Jurnal Penyesuaian atas koreksi akumulasi penyusutan tahun 2020	(69.705.467)
	(200.420.767)

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp6.612.731.846,00 merupakan penyesuaian atas beberapa akun yang terdiri dari:

Saldo Awal	95.156.717.608
a. Jurnal balik koreksi ekuitas tahun 2020	(95.156.717.608)
b. Jurnal penyesuaian atas persediaan alat kesehatan	1.535.104.743
c. Jurnal penyesuaian atas persediaan obat per 31 desember 2021	2.368.056.824
d. Jurnal penyesuaian atas penambahan aset karena mutasi dari Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen	1.938.441.000
e. Jurnal penyesuaian atas koreksi aset yang tidak termasuk belanja modal (BM)	(50.815.572)
f. Jurnal penyesuaian atas reklasifikasi aset ekstrakompatable (kapitasi dibawah Rp300.000,00).	(883.982)
g. Jurnal penysuaian atas koreksi tahun lalu tahun 2020	
Piutang Pendapatan	792.918.666
Akumulasi Penyisihan Piutang	45.316.559
Utang Belanja Barang dan Jasa	115.308.908
Jumlah	953.544.133
Saldo Akhir	**6.743.447.146**

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.938.441.000,00, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/ 12944 tanggal 31 Desember 2021 oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

PENJELASAN AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

19. PENDAPATAN JASA LAYANAN

Akun ini terdiri dari:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Layanan Pasien Umum/ Retribusi Daerah		
a. Pendapatan IGD	699.454.954	931.606.263
b. Pendapatan Rawat Jalan dan Rawat Inap	3.772.429.806	7.482.756.558
c. Pendapatan Covid	61.894.453.800	-
d. MCU Haji	-	108.098.400
e. Radiologi	71.368.153	31.276.500
f. Laborat	-	19.600.000
g. Pendapatan Layanan Pasien Umum lainnya	1.998.000	934.000
Sub Jumlah	66.439.704.713	8.574.271.721
Kapitasi	-	-
Non Kapitasi		
a. Pendapatan Rawat Jalan dan Rawat Inap	19.829.158.214	17.761.667.501
b. Pendapatan Ambulance	43.916.600	-
c. Pendapatan Farmasi	1.134.322.607	-
d. Ganti Rugi BPJS	-	125.277.456
e. Obat BPJS	-	897.998.141
Sub Jumlah	21.007.397.421	18.784.943.098
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	**87.447.102.134**	**27.359.214.819**

20. PENDAPATAN HASIL KERJASAMA

Akun ini terdiri atas:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Sewa	36.674.750	15.522.750
Pendapatan Jasa dan Lainnya	166.554.528	12.632.460
Jumlah	**203.229.278**	**28.155.210**

Catatan sehubungan akun ini:

Pendapatan sewa merupakan pendapatan yang berasal dari sewa ATM Bank Jateng dan pendapatan jasa dan lainnya merupakan pendapatan dari hasil rapid test siswa praktek dan sewa manekin.

21. PENDAPATAN APBD

Akun ini terdiri atas :	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan dari APBD	21.170.551.142	25.003.945.146
Jumlah	**21.170.551.142**	**25.003.945.146**

Catatan sehubungan akun ini:

Pendapatan dari dana APBD terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Operasi, dan Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

22. PENDAPATAN HIBAH

Akun ini terdiri dari:	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan hibah dari Bank Jateng Cabang Kebumen	-	30.000.000
Pendapatan hibah dari Masyarakat	-	222.744.000
	-	**252.744.000**

Catatan sehubungan akun ini:

Tahun 2020 terdapat pendapatan hibah berupa peralatan dan mesin atas hibah dari Bank Jateng Cabang Kebumen berupa kendaraan roda 3 (Viar) Sebesar Rp30.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hibah pada tanggal 27 April 2020 dan hibah dari masyarakat berupa barang habis pakai, obat-obatan dan makanan pokok sebesar Rp222.744.000,00.

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri atas :	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
Pendapatan Bunga Deposito	255.862.998	435.534.230
Pendapatan Parkir	22.647.300	39.782.000
Pendapatan Jasa Giro	176.375.613	88.944.798
Jumlah	**454.885.911**	**564.261.028**

24. BEBAN OPERASI

Akun ini terdiri atas :	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021	2020
1). Beban Pegawai		
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	3.600.000
Belanja Tunjangan Tertentu	-	29.864.400
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	137.620.000	217.475.000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	5.155.000	4.400.000
Honorarium Penerima Panitia Hasil Pekerjaan	-	1.650.000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.740.000	6.982.525.000
Uang Lembur PNS	-	84.797.600
Uang Lembur Non PNS	-	23.785.900
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapat	6.050.000	-
Jumlah Beban Pegawai	**182.565.000**	**7.348.097.900**
2). Beban Barang dan Jasa		
a). Beban Barang		
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.968.263	218.096.239
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	214.062.500	82.855.700
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.839.000	6.924.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	524.946.559	279.852.500
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	523.793.600	395.153.290
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiat	157.440.950	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	94.241.110	-
Beban Obat-Obatan-Obat	8.630.482.644	4.832.511.219
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	983.686.340	498.118.940
Beban Bahan-Bahan Kimia	-	83.124.432
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	187.486.485	199.436.616
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	230.057.930	169.942.520
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	19.776.350	12.815.000
Beban Bahan-Bahan Lainnya	4.585.790.534	421.795.941
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	977.872.510	2.592.593.215
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.000.000	47.643.500
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.381.201.780	893.703.043
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.151.000	197.188.970
Beban Makanan dan Minuman Rapat	125.309.900	108.356.600
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.296.400	6.002.700
Belanja Pemakaian Barang Radiologi	180.818.000	173.490.801
Belanja Pemakaian Barang laboratorium	1.227.415.747	990.479.538
Beban Pakaian Batik Tradisional	-	69.500.000
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.215.200	-
Beban Pakaian Olahraga	10.500.000	-
Beban Pakaian Penyelamatan	404.576.000	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	128.997.000	-
Beban Komponen-Komponen Peralatan	39.044.500	-
Beban Komponen-Komponen Lainnya	151.181.400	-
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.780.000	-
Sub Jumlah	20.861.931.702	12.279.584.764

		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	**2020**
b).	Beban Jasa		
	Beban Tagihan Telepon	11.487.384	11.806.100
	Beban Tagihan Air	231.553.358	101.819.450
	Beban Tagihan Listrik	914.537.480	802.948.080
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	962.400	65.700
	Beban Jasa Uji Laboraturium	48.545.720	878.428.484
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000	-
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	109.216.500	119.390.000
	Beban Jasa Kalibrasi	199.426.700	-
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	417.578.350	-
	Beban Jasa Pelayanan (Kapitasi dan Retribusi)	14.765.590.048	10.697.165.403
	Beban Jasa Khusus Konsultasi dan Sertifikasi	211.143.000	-
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	-	179.630.800
	Beban Lembur	84.229.200	-
	Beban Pemberian Jasa Kontribusi Asosiasi	793.881.700	279.895.000
	Beban Pemberian Jasa Tenaga Ahli	-	95.000.000
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.050.000	7.700.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.547.546.541	-
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.680.000	4.968.000
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.451.301	47.187.300
	Beban Registrasi/Keanggotaan	-	16.900.000
	Beban Paket/Pengiriman	1.381.340	959.700
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	187.041.541	85.892.800
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.173.500	9.423.500
	Beban Medical Check Up	49.325.900	-
	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	12.444.444	17.777.778
	Beban Sewa kendaraan Bermotor Penumpang	450.000	-
	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor	3.150.000	-
	Beban Sewa Hotel	450.000	-
	Beban Barang dan Jasa BLUD	811.160	-
	Sub Jumlah	44.672.107.567	13.356.958.095
c).	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	66.910.475	18.423.000
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	655.916.199	789.106.448
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	973.296.385	674.532.545
	Sub Jumlah	1.696.123.059	1.482.061.993
d).	Beban Perjalanan Dinas		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	77.359.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.242.649	183.705.176
	Sub Jumlah	97.242.649	261.064.176

Jumlah Beban Barang dan Jasa	**67.327.404.977**	**27.379.669.028**

3). Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Peralatan dan Mesin	18.880.588.579	16.839.356.454
Gedung dan Bangunan	2.215.082.376	2.176.459.702
Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.300.000	3.300.000
Jumlah Beban Penyusutan	**21.098.970.955**	**19.019.116.156**
4). Beban Penyisihan Piutang	**1.683.294.344**	**22.858.931**
Jumlah Beban Operasi	**90.292.235.276**	**34.750.625.859**

25. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 yang diselesaikan tanggal 31 Januari 2022.